KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	WIM.25.IMI.2-OT.02.02-92 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	02 Januari 2026
Disahkan Oleh ${ttd_pengirim}	KEPALA KANTOR  RURI H. ROESMAN NIP 198409092003121003
Nama SOPAP	PEMBANTARAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyidikan keimigrasian;
2. Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian;
3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
4. Memiliki kemampuan administratif;
5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan
6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan subkoordinator dan koordinator terkait.

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOPAP Penahanan; 2. SOPAP Perpanjangan Penahanan; 3. SOPAP Pencabutan Pembantaran.	1. Kelengkapan keamanan diri; 2. Komputer; 3. *Printer;* 4. *Scanner*;dan 5. Alat tulis kantor.
Peringatan	**Pencatatan Dan Pendataan**
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses pembantaran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PEMBANTARAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat konsep Surat pemberitahuan permintaan bantuan pembantaran kepada Rutan/Lapas dan Jaksa Penuntut Umum						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; e. Hasil Pemeriksaan Medis; f. Surat Keterangan Dokter.	1 jam	Konsep Surat pemberitahuan permintaan bantuan pembantaran kepada Rutan/Lapas dan Jaksa Penuntut Umum	Dalam hal tersangka yang ditahan sakit berdasarkan surat keterangan dokter yang bertugas di Rutan/Lapas
2	Memeriksa konsep Surat pemberitahuan permintaan bantuan pembantaran kepada Rutan/Lapas dan Jaksa Penuntut Umum						Konsep Surat pemberitahuan permintaan bantuan pembantaran kepada Rutan/Lapas dan Jaksa Penuntut Umum	1 jam	Persetujuan konsep pemberitahuan permintaan bantuan pembantaran kepada Rutan/Lapas dan Jaksa Penuntut Umum	
3	Menyampaikan konsep Surat pemberitahuan permintaan bantuan pembantaran kepada Rutan/Lapas dan						Persetujuan konsep Surat pemberitahuan permintaan bantuan pembantaran kepada Rutan/Lapas dan Jaksa Penuntut Umum	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat pemberitahuan permintaan bantuan pembantaran kepada	

	Jaksa Penuntut Umum								Rutan/Lapas dan Jaksa Penuntut Umum.	
4	Penandatanganan Surat pemberitahuan permintaan bantuan pembantaran kepada Rutan/Lapas dan Jaksa Penuntut Umum	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat pemberitahuan permintaan bantuan pembantaran kepada Rutan/Lapas dan Jaksa Penuntut Umum.	1 jam	Surat Permohonan pemberitahuan permintaan bantuan pembantaran kepada Rutan/Lapas dan Jaksa Penuntut Umum	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS.
5	Mengirimkan surat pemberitahuan permintaan bantuan pembantaran kepada Rutan/Lapas dan Jaksa Penuntut Umum						a. Surat pemberitahuan permintaan bantuan pembantaran kepada Rutan/Lapas dan Jaksa Penuntut Umum; b. Lembar Tanda Terima Surat.	2 jam	Surat pemberitahuan permintaan bantuan pembantaran kepada Rutan/Lapas dan Jaksa Penuntut Umum	
6	Membuat konsep Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Sementara dalam rangka Pembantaran						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; e. Hasil Pemeriksaan Medis; f. Surat Keterangan Dokter; g. Surat pemberitahuan permintaan	1 jam	Konsep Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Sementara dalam rangka Pembantaran	

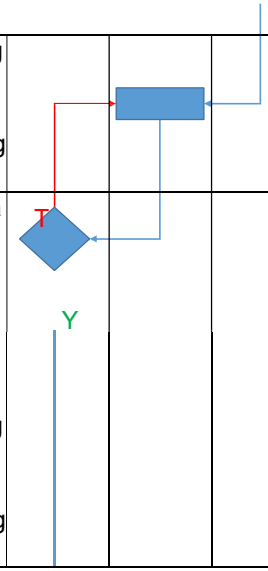
							bantuan pembantaran.			
7	Memeriksa konsep Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Sementara dalam rangka Pembantaran						Konsep Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Sementara dalam rangka Pembantaran	1 jam	Persetujuan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Sementara dalam rangka Pembantaran	
8	Menyampaikan konsep Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Sementara dalam rangka Pembantaran						Persetujuan Konsep Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Sementara dalam rangka Pembantaran	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Sementara dalam rangka Pembantaran.	
9	Penandatanganan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Sementara dalam rangka Pembantaran	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Sementara dalam rangka Pembantaran.	1 jam	Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Sementara dalam rangka Pembantaran	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS
10	Membuat konsep Surat Perintah Pembantaran Penahanan dalam hal tersangka yang ditahan sakit berdasarkan						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;	1 jam	Konsep Surat Perintah Pembantaran Penahanan dalam hal tersangka yang ditahan sakit berdasarkan keterangan dokter	

	keterangan dokter							e. Hasil Pemeriksaan Medis; f. Surat Keterangan Dokter; g. Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Sementara dalam rangka Pembantaran.			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PEMBANTARAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Memeriksa konsep Surat Perintah Pembantaran Penahanan dalam hal tersangka yang ditahan sakit berdasarkan keterangan dokter						Konsep Surat Perintah Pembantaran Penahanan dalam hal tersangka yang ditahan sakit berdasarkan keterangan dokter	1 jam	Persetujuan Surat Perintah Pembantaran Penahanan dalam hal tersangka yang ditahan sakit berdasarkan keterangan dokter	
12	Menyampaikan konsep Surat Perintah Pembantaran Penahanan dalam hal tersangka yang ditahan sakit berdasarkan keterangan dokter						Persetujuan Konsep Surat Perintah Pembantaran Penahanan dalam hal tersangka yang ditahan sakit berdasarkan keterangan dokter	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Perintah Pembantaran Penahanan dalam hal tersangka yang ditahan sakit berdasarkan keterangan dokter.	
13	Penandatanganan Surat Perintah Pembantaran Penahanan	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep SuSurat Perintah Pembantaran Penahanan dalam	1 jam	Surat Perintah Pembantaran Penahanan dalam hal tersangka yang ditahan sakit berdasarkan	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS

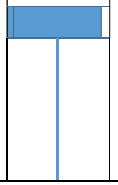
	dalam hal tersangka yang ditahan sakit berdasarkan keterangan dokter						hal tersangka yang ditahan sakit berdasarkan keterangan dokter.		keterangan dokter	
14	Membuat konsep Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan kepada keluarga Tersangka dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila tersangka Orang Asing)						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; e. Hasil Pemeriksaan Medis; f. Surat Keterangan Dokter; g. Surat Perintah Pembantaran Penahanan.	1 jam	Konsep Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	
15	Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)						Konsep Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	1 jam	Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	
16	Menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan kepada keluarga dan/atau						Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan kepada keluarga dan/atau	

	Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)						(apabila Tersangka Orang Asing)		Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing).	
17	Penandatanganan Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)						a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing).	1 jam	Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS

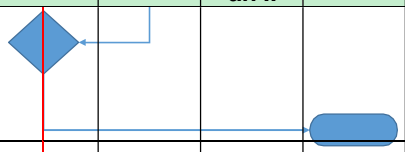
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PEMBANTARAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
18	Pelaksanaan pembantaran						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; e. Hasil Pemeriksaan Medis; f. Surat Keterangan Dokter; g. Mobil Dinas/Ambulance; h. Surat Perintah Pembantaran Penahanan.	2 jam	Berita Acara Pembantaran	Masa pembantaran penahanan tidak dihitung sebagai waktu penahanan
19	Pemberitahuan pelaksanaan Pembantaran kepada keluarga tersangka						Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	2 jam	Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing) terkirim ke tujuan	

20	Membuat konsep Surat Tugas Pengawalan Pembantaran ke Rumah Sakit						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Perintah Pembantaran Penahanan; e. Berita Acara Pembantaran; f. Daftar Petugas.	1 jam	Konsep Surat Tugas Pengawalan Pembantaran ke Rumah Sakit	
21	Memeriksa konsep Surat Tugas Pengawalan Pembantaran ke Rumah Sakit						Konsep Surat Tugas Pengawalan Pembantaran ke Rumah Sakit	1 jam	Persetujuan konsep SurSurat Tugas Pengawalan Pembantaran ke Rumah Sakit	
22	Menyampaikan konsep Surat Tugas Pengawalan Pembantaran ke Rumah Sakit						Persetujuan konsep Surat Tugas Pengawalan Pembantaran ke Rumah Sakit	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Tugas Pengawalan Pembantaran ke Rumah Sakit.	
23	Penandatangan an Surat Tugas Pengawalan Pembantaran ke Rumah Sakit	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Tugas Pengawalan Pembantaran ke Rumah Sakit.	1 jam	Surat Tugas Pengawalan Pembantaran ke Rumah Sakit	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS
24	Membuat konsep Surat Perintah Penjagaan Pembantaran di Rumah Sakit						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Perintah Pembantaran Penahanan; e. Daftar Petugas.	1 jam	Konsep Surat Perintah Penjagaan Pembantaran di Rumah Sakit	
25	Memeriksa konsep Surat						Konsep Surat Perintah Penjagaan	1 jam	Persetujuan konsep Surat Perintah	

	Perintah Penjagaan Pembantaran di Rumah Sakit						Pembantaran di Rumah Sakit		Penjagaan Pembantaran di Rumah Sakit	
26	Menyampaikan konsep Surat Perintah Penjagaan Pembantaran di Rumah Sakit						Persetujuan konsep Surat Perintah Penjagaan Pembantaran di Rumah Sakit	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Perintah Penjagaan Pembantaran di Rumah Sakit.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PEMBANTARAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
										
27	Penandatanganan Surat Perintah Penjagaan Pembantaran di Rumah Sakit	Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Perintah Penjagaan Pembantaran di Rumah Sakit.	1 jam	Surat Perintah Penjagaan Pembantaran di Rumah Sakit	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS
28	Pelaksanaan penjagaan pembantaran						a. Surat Perintah Penjagaan Pembantaran; b. Alat Komunikasi; c. Kelengkapan keamanan diri.	2 jam	Laporan Penjagaan Pembantaran	1. Kelengkapan keamanan diri berupa: a. Borgol; b. Senjata Api; c. Body Armor dan Bodycam; d. Helm Tactical; e. dsb. 2. Setelah masa pembantaran selesai, PPNS mencabut Pembantaran Penahan dan dilakukan Penahanan lanjutan